

## Web-Based Application Of Population Services In Keboharan Village, Krian – Sidoarjo

### Aplikasi Pelayanan Kependudukan Pada Desa Keboharan, Krian – Sidoarjo Berbasis Web

Amwalinsanu<sup>1</sup>, Hindarto<sup>2</sup>

{[walonwalin@gmail.com](mailto:walonwalin@gmail.com)<sup>1</sup>, [hindarto@umsida.ac.id](mailto:hindarto@umsida.ac.id)<sup>2</sup>}

<sup>1,2</sup> Program Studi Informatika, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstract.** *The resident service is obliged to provide protection and recognition of the personal status and legal status of every population event. For this reason, every important event requires every valid evidence to be administered and recorded in accordance with the provisions of the law. Population matters relating to the number of structures, gender, religion, birth, marriage, pregnancy, death, and the quality of the political economy, social, and culture. Population and important events require valid evidence for administration and recording in accordance with the provisions of the law. Population administration is defined as services in the population sector provided by government and non-government officials from the central level to the village or sub-district level, RW and RT. In population administration services, government and non-government officials provide services such as arranging marriage permits, applying for ID cards, certificates, and family cards, and other residence documents.*

**Keyword :** *Resident services, Villagers, Village information, Administration..*

**Abstrak.** *Pelayanan penduduk adalah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum status setiap peristiwa kependudukan, Untuk itu setiap peristiwa yang penting memerlukan setiap bukti yang sah untuk dilakukan administrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kependudukan tentang hal yang berkaitan dengan jumlah struktur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, dan kualitas yang menyangkut politik ekonomi, soial, dan budaya. Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Administrasi kependudukan diartikan sebagai pelayanan di bidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan nonpemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan , RW dan RT. Pada pelayanan administrasi kependudukan, aparat pemerintah dan nonpemerintah memberikan pelayanan misalnya pengurusan izin nikah, permohonan KTP, surat keterangan, dan kartu keluarga, dan surat-surat kependudukan yang lain.*

**Kata Kunci :** *Pelayanan penduduk, Penduduk desa, Informasi desa, Administrasi.*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu contoh pemberdayaan pemerintah desa untuk menjadikan masyarakat desa dalam peningkatan sumber daya yang digunakan untuk kehidupan dalam berbagai hal[1]. Salah satu kinerja Aparatur Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hasil pertanian disetiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan [2] Pengaruh kualitas pelayanan pemerintah desa terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang intensif akan membuat masyarakat desa yakin dalam bertindak sesuai rencana yang dibutuhkan [3].

Strategi pembangunan untuk desa, meningkatkan kemakmuran masyarakat desa untuk lebih memperhatikan keadaan desa dan serta membangun kerukunan untuk ketentraman jiwa sosial [4]. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa dibutuhkan agar pemererat dalam suatu social misalnya seperti setiap minggu ada kegiatan kerja bakti dan mengadakan rapat untuk usulan desa yang kurang untuk dibenahi. [5]. Kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat dibutuhkan juga partisipasi untuk masyarakat desa dalam system yang akan diperbaiki [6].

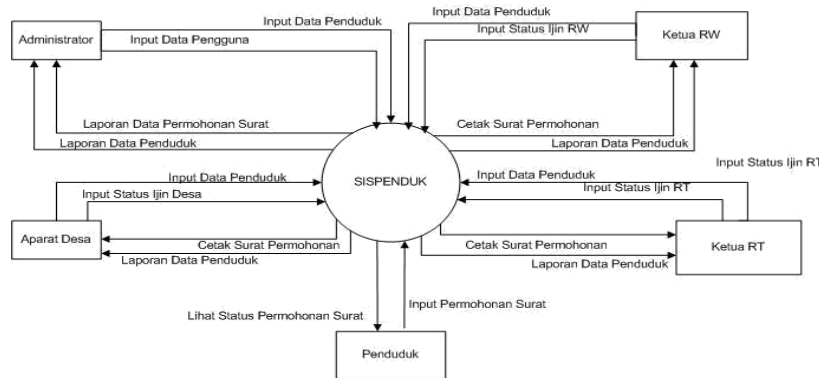
Dalam usaha kepemimpinan mendukung keadaan desa dalam mengurangi gejala- gejala yang dialami masyarakat dalam mengambil keputusan sangat membantu dalam berbagai hal dilingkungan desa[7]. Suatu ketindakan aparat desa usaha yang memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang berasal dari hasil pengolahan data menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Komponen - komponen yang terdapat dalam sistem informasi yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data dan komponen kontrol dalam pelayanan penduduk[8].

Sehingga dapat Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait kondisi pada desa dan juga memberikan informasi data kependudukan dan aset desa [9]. Peneliti menggunakannya sebagai pencatatan sirkulasi peminjaman dan pengembalian serta laporan-laporan data secara komputerisasi sehingga dengan mudah pengelolaan data serta penyampaian informasi dan pengaduan keluhan kondisi masyarakat desa karena memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan nya dengan bebas terkait jika ada terjadi suatu masalah, sehingga masyarakat secara bebas menyampaikan aspirasi keluhan yang terjadi pada masyarakat desa[10].

## II. METODE

### A. Model pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian Sistem Informasi

Pelayanan Kependudukan ini adalah model *Waterfall* atau model sekuensial linier. Model *Waterfall* atau model sekuensial linier merupakan model rekayasa piranti lunak. Model *waterfall* adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, di mana kemajuan suatu sistem dipandang sebagai suatu hal yang terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi) dan pengujian.

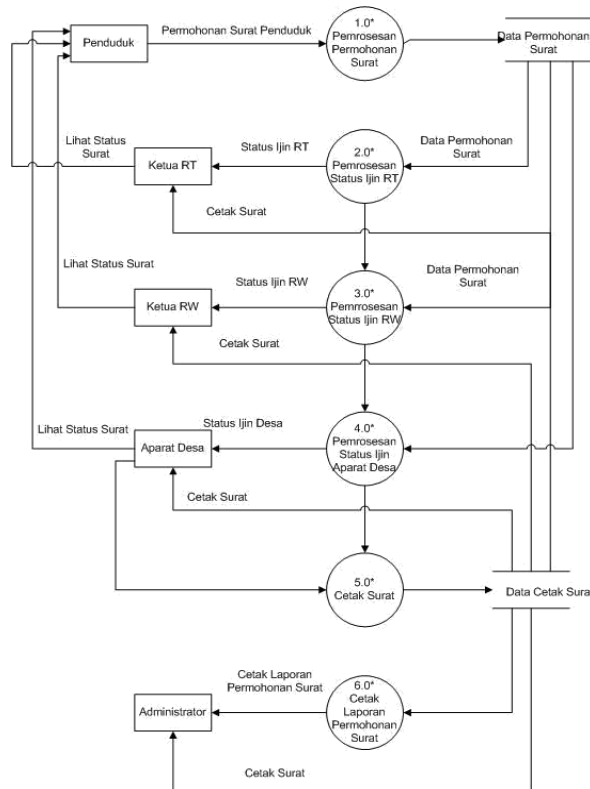


**Gambar 1.** Diagram Konteks atau Diagram Level 0 SISPENDUK

Gambar 1. menunjukkan suatu siklus yang didalamnya terdapat beberapa alur data dari jalannya sistem ini. Pada siklus ini terdapat *input*, proses dan *output*. Input yang dilakukan oleh administrator, aparat desa, ketua RW, ketua RT dan warga akan di olah dalam suatu proses yang nantinya akan menghasilkan suatu output yaitu hasil rekap data warga dan hasil rekap permohonan pelayanan.

### B. Perancangan Data Flow Diagram

Diagram Konteks yang telah dibuat pada tahap rencana pendahuluan, selanjutnya dijabarkan kedalam pandangan yang lebih detil, dengan penyusunan *Data Flow Diagram*(DFD) yang merupakan penurunan dari diagram konteks.



**Gambar 2.** Flowchart Aplikasi

### C. Cara Kerja Website

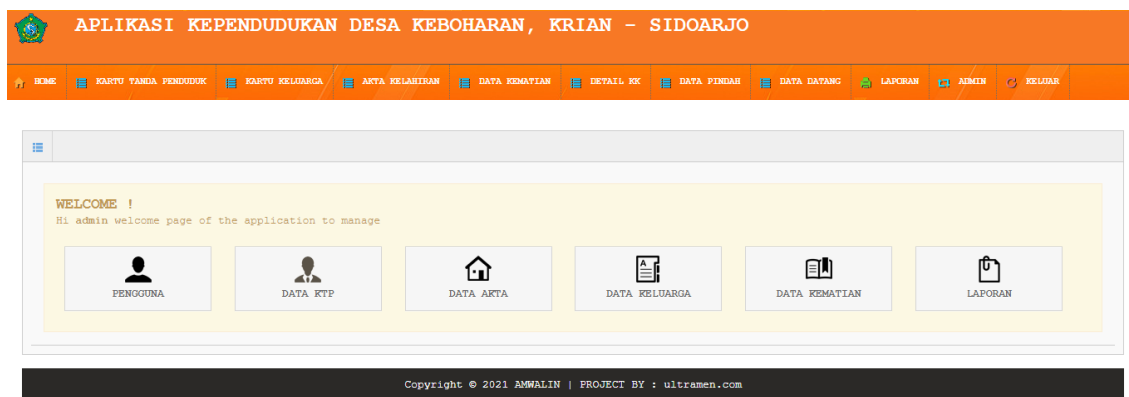
Pada website ini akan di jelaskan bagaimana cara kerja program, pertama admin masuk ke dalam website dan melakukan login terlebih dahulu pada admin panel, mengisi username dan password, kemudian masuk ke dalam tampilan dasbord untuk mengatur semua program yang ada di dalam website, pada langkah awal admin akan mengisi nama penduduk yang mengurus berkas, sesuai tujuan masing-masing penduduk, jika ada admin melakukan keasalahan dalam input data, admin bisa mengubah atau edit berkas penduduk yang mengalami kesalahan dalam proses pengurusan, lalu bisa cetak jika berkas tersebut dalam proses sudah benar dan selesai.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi yang terdapat pada website digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam hal mengurus dan mempersingkat pembuatan berkas-berkas yang akan digunakan dengan mudah, sehingga dengan adanya aplikasi ini penulis berharap bisa membantu masyarakat dalam menjalankan tugasnya, Adapun pembahasan dari proses pembuatan website, akan dijelaskan berikut ini.

### A. Pembuatan User Interface

Untuk pembuatan desain User interface menggunakan bahasa pemrograman CSS dan HTML, yang mana mencakup desain dan pembuatan desain form.



Gambar 3. Halaman user interface

### B. Tampilan Website

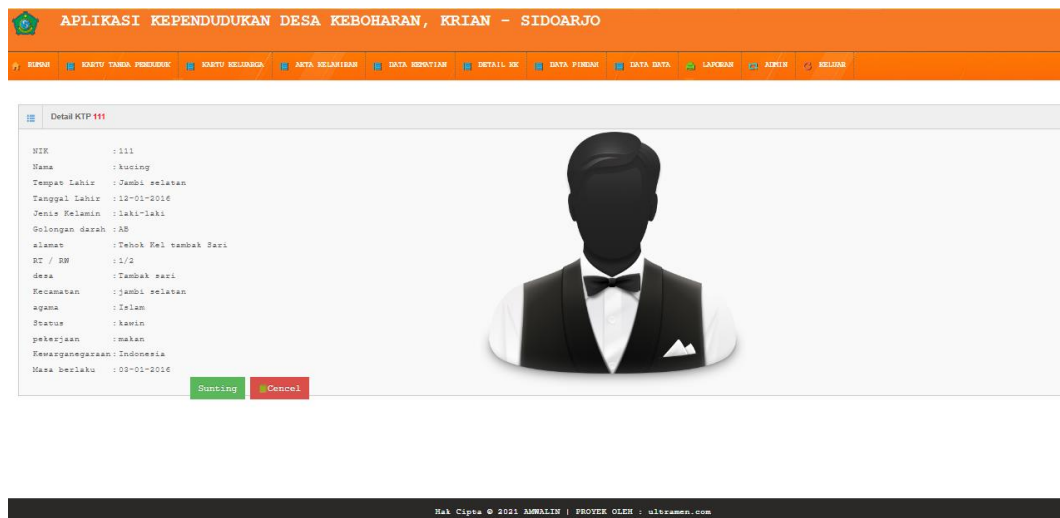
Pada halaman pertama website yaitu terdapat form login untuk mengakses website, untuk bisa mengakses semua data data pada website maka admin harus login terlebih dahulu.



Gambar 4. Tampilan pada website

### C. Hasil Data Yang Sudah Di Input

Berikut adalah hasil data penduduk yang sudah berhasil diinput kedalam website.



Gambar 5. Tampilan data yang sudah diinput

Apabila ada kesalahan data, admin bisa menggunakan menu sunting atau edit data, yang ada di samping tabel, sehingga mempermudah admin jika ada data yang salah, dan selanjutnya akan di cetak laporan.



Gambar 6. Menu Untuk Merubah Data

## IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian aplikasi dapat di simpulkan sebagai berikut menurut masyarakat aplikasi ini sangat penting, karena di era sekarang ini semua sudah bisa dilakukan dengan sistem online dan menghemat waktu, sehingga data data yang disimpan juga aman, bilamana ingin mencari data, admin tinggal memasukan Nama atau NIK dan data akan muncul. Aplikasi ini dapat mempermudah pengurusan data penduduk pada masyarakat yang tidak bisa menggunakan sistem online.

## REFERENSI

- [1] Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [2] Agustin, Michellia. 2015. Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jurnal Fisip, Volume 2, Nomor 1.
- [3] Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [4] Hotima, Siti Husnul. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap an Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Majalah Ilmiah “DIAN ILMU”, Volume 12, Nomor 2.  
Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- [5] Mahardani, Ardhana Januar. 2014. Strategi Pembangunan Desa. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Pres.
- [6] Mulyadi, Mohammad. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Tangerang Selatan : Nadi Pustaka.
- [7] Ndraha, Talizuduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1 – 2. Jakarta : Rineka Cipta.
- [8] Ningsih, febrianti. 2013. Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2.
- [9] Pasolong, Harbani. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : Alfabeta.
- [10] Rahman, M. D. M., Mustafi, M. A. A., & Azad, M. M. (2013). Analysis of the determinant's of marriage to first birth interval in Bangladesh. International Journal of Management and Sustainability, 2(12), 208-219.